

SKRIPSI

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)
TERHADAP KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DI ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

**RAUDIA ULFA
NIM. 140602216**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Raudia Ulfa
NIM : 140602216
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2019
Yang Menyatakan,



Raudia Ulfa

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) TERHADAP KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI ACEH BESAR

Disusun Oleh:

Raudia Ulfa
NIM. 140602216

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II,



Cut Elfida, S. HI., MA
NIDN. 2012128901

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Raudia Ulfa

NIM. 140602216

Dengan Judul:

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Aceh Besar

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 17 Juli 2019

14 dzulqa'dah 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Sekretaris,

Cut Elfida, S. HI., MA
NIDN. 2012128901

Penguji I,

Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 0106077507

Penguji II,

Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME
NIDN. 2006019002



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 19640141992031003



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Raudia Ulfa
NIM : 140602216
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : raudiaulfa1996@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Aceh Besar

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 17 Juli 2019

Mengetahui,

Penulis

Raudia Ulfa
140602216

Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 19640314 199203 1 003

Pembimbing II

Cut Elfida, S. HI., MA
NIDN: 2012128901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu. (HR. Muslim)

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman. (Q.S. Ali 'Imran: 139)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... (Al-Baqarah: 286)

Segala puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Dengan setulus hati karya ini ku persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan, mendukung, memotivasi dan memberikan semangat. Ucapan terimakasih tidak pernah cukup untuk membalas doa dan perjuangan mereka. Tanpa mereka saya tidak akan sampai pada titik ini.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Aceh Besar”**. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, MA selaku Wakil Dekan II dan

Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Cut Dian Fitri, SE, M.Si, Ak.CA selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua dan Ibu Hafidhah, SE., M.Si.Ak.CA selaku sekretaris Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Cut Elfida, S. HI., MA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan, waktu dan pikiran serta bimbingan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Khairul Amri, SE.,M.Si selaku penguji I dan Bapak Hafiizh Maulana,SP.,S.HI.,ME selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi syariah.
7. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya

kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

8. Kedua orang tua tercinta, ayahanda M. Nur Yahya dan ibunda Asnawati yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, cinta, doa, serta motivasi yang tiada henti agar penulis dapat memperoleh yang terbaik yang tidak dapat ternilai dan terbalaskan. Abang-abangku tersayang Imam Daniel Hawary dan Kaisar Al Ghifary dan adik-adikku Thezar Purna Danasty dan M. Luthfy Dudona serta seluruh keluarga besar tercinta terutama Nenek Rusmini, waksalbiah, dan maklot Rahmi yang telah membantu mendoakan, memberikan semangat serta motivasi tiada henti dalam masa perkuliahan penulis guna memperoleh gelar sarjana dan ilmu yang diharapkan dapat berguna bagi bangsa dan tanah air.
9. Sahabat-sahabat terbaikku nurul, nura, vio, mauliza, darin, rahmi, juli, shinta, siti rauzah, icut, desi, waddah, mega, emon, hikmah, afdana, kak soleha, kak ain, dewi, kausar, fathir, hendri, bg nizam dan kawan-kawan lainnya baik diluar maupun kawan seangkatan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan masukan, saran, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

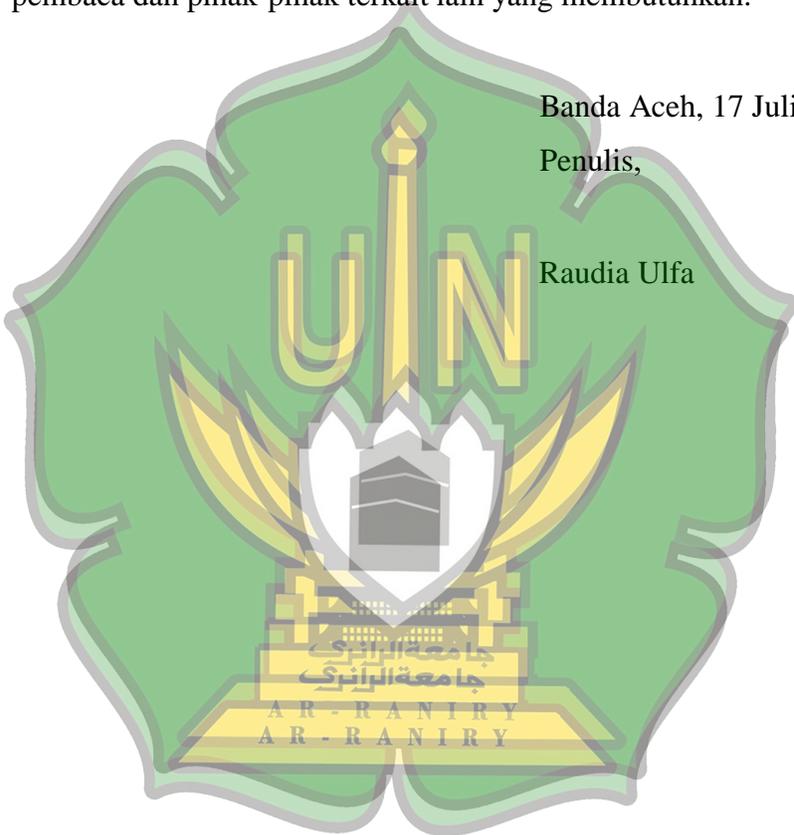
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon

maaf atas kesalahan penulis baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak terkait lain yang membutuhkan.

Banda Aceh, 17 Juli 2019

Penulis,

Raudia Ulfa



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1.	ا	Tidak dilambangkan	16.	ط	Ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	Z
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Ṣ	19.	غ	G
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	Ḥ	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Z	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sy	28.	ء	’
14.	ص	Ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَقُولُ :yaqūlu

d. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat arkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

c. Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat arkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Raudia Ulfa
NIM : 140602216
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Aceh Besar
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI., MA
Kata kunci : IPM, TPAK, Kemiskinan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Besar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan TPAK juga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya hasil dari uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa secara bersamaan IPM dan TPAK memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh Besar.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
LEMBAR TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Kemiskinan	14
2.1.1. Definisi Kemiskinan	14
2.1.2. Teori Kemiskinan	18
2.1.3. Ciri-Ciri Kemiskinan	19
2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan	20
2.1.5. Ukuran Kemiskinan	24
2.1.6. Garis Kemiskinan	27
2.2. Kemiskinan dalam Perspektif Islam	29
2.2.1. Penyebab Kemiskinan dalam Perspektif Allah	31
2.2.2. Bahaya Kemiskinan	33
2.2.3. Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Islam	34

2.3. Indeks Pembangunan Manusia	37
2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Islam.....	40
2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	42
2.4.1. Angkatan Kerja dalam Islam	45
2.5. Penelitian Terdahulu.....	48
2.6. Pengaruh Variabel Independen dan Dependen	51
2.6.1. Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan.....	51
2.6.2. Pengaruh TPAK Terhadap Kmeiskinan	52
2.7. Kerangka Pemikiran	53
2.8. Hipotesis	56
BAB III METODELOGI PENELITIAN	57
3.1. Jenis Penelitian	57
3.2. Lokasi Penelitian	58
3.3. Data dan Teknik Pemerolehannya.....	58
3.4. Teknik Pengumpulan Data	59
3.5. Variabel Penelitian	59
3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian	60
3.7. Teknik Analisis Data.....	61
3.7.1. Uji Asumsi Klasik	61
3.7.1.1. Uji Normalitas	62
3.7.1.2. Uji Multikolinieritas	62
3.7.1.3. Uji Autokorelasi	62
3.7.1.4. Uji Heteroskedastisitas	63
3.7.2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	63
3.8. Pengujian Hipotesis.....	64
3.8.1. Uji Simultan (Uji F)	64
3.8.2. Uji Parsial (Uji t).....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar	66
4.1.1. Sejarah Kabupaten Aceh Besar.....	66
4.1.2. Letak Geografis Kabupaten Aceh Besar	68
4.1.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar	69
4.1.4. Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Besar	70
4.2. Gambaran Umum Objek Penelitian	70
4.2.1. Gambaran Umum Kemiskinan di Kabupaten	

Aceh Besar	70
4.2.2. Gambaran Umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Besar	72
4.2.3. Gambaran Umum Tingkat Partisipan Angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Aceh Besar.....	74
4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	75
4.3.1. Uji Normalitas.....	76
4.3.2. Uji Multikolinieritas.....	77
4.3.3. Uji Autokorelasi.....	78
4.3.4. Uji Heteroskedastisitas.....	78
4.4. Analisis Regresi Linier Berganda.....	79
4.5. Pengujian Hipotesis	81
4.5.1. Uji Parsial (Uji t).....	81
4.5.2. Uji Simultan (Uji F).....	82
4.5.3. Koefisien Determinasi (R ²)	82
4.6. Pembahasan	83
4.6.1. Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan	86
4.6.2. Pengaruh TPAK Terhadap Kemiskinan.....	86
4.6.3. Pengaruh IPM dan TPAK Terhadap Kemiskinan	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN95

A R - R A N I R Y

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

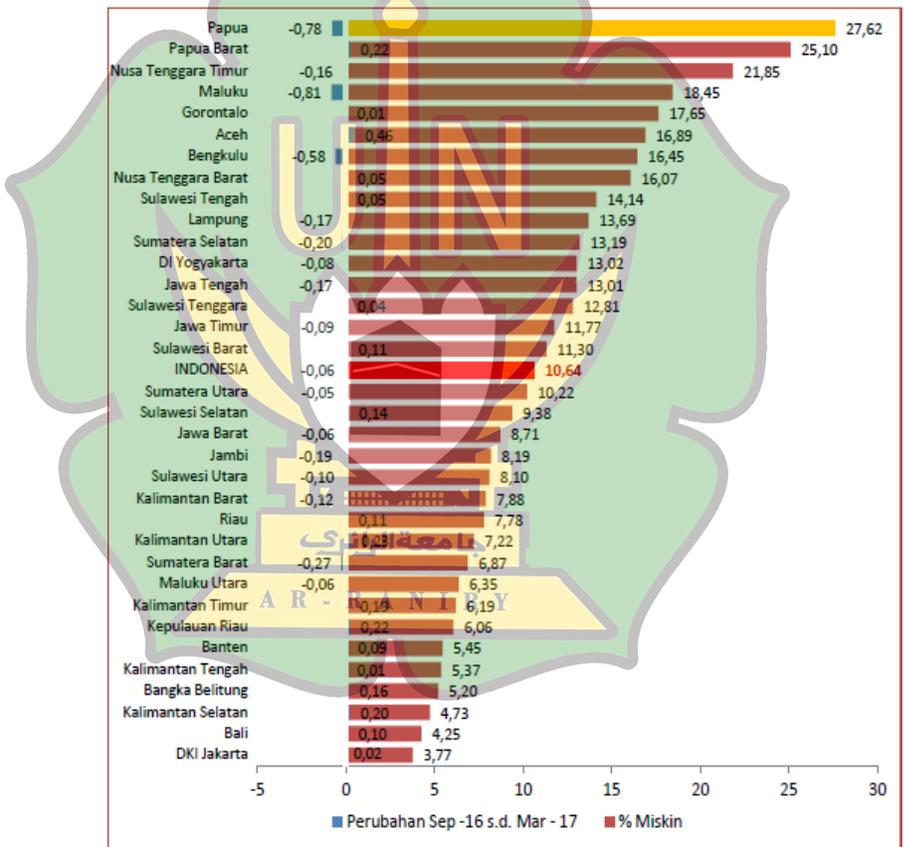
Kemiskinan adalah suatu fenomena sosial bahkan juga dianggap sebagai suatu problem yang dihadapi oleh setiap masyarakat seluruh dunia sepanjang masa. Kemiskinan merupakan suatu keadaan seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya, juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Todaro, 1998:152).

Tingginya persentase penduduk miskin dalam suatu wilayah menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan pendapatan perkapita mereka rendah. Keadaan ini diperparah lagi jika tingkat pengangguran dalam wilayah tersebut juga tinggi (Harlik, 2013). Kemiskinan dan ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) merupakan dua masalah besar yang banyak terjadi di negara sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia (Tambunan, 2006:141). Tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2011 sampai tahun 2015, namun terjadi peningkatan kemiskinan pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,22 persen dari 10,96 persen di tahun 2014 (BPS, 2017).

Persentase penduduk miskin menurut provinsi se-Indonesia berdasarkan data Susenas pada Maret 2017 menunjukkan bahwa Aceh berada pada posisi ke 6 yaitu 16,89 %, yang berarti

mengalami kenaikan 0,46 % dari september 2016. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Aceh masih tetap berada di urutan pertama untuk kemiskinan tertinggi di pulau Sumatera. Sedangkan pada tahun 2011 sampai 2015, Aceh menempati urutan kemiskinan tertinggi di pulau Sumatera yaitu 18,34 % (BPS, 2017).

Berikut disajikan tabel data persentase penduduk miskin Maret 2017 menurut Provinsi (Susenas):



Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Gambar 1.1
Tabel data persentase penduduk miskin Maret 2017
menurut Provinsi (Susenas)

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih akurat tentang kemiskinan di Aceh Besar. Persentase penduduk miskin di daerah kabupaten Aceh Besar terus mengalami penurunan sejak tahun 2008 hingga tahun 2017. Pada tahun 2008, persentase penduduk miskin Aceh Besar mencapai 21,52 persen dengan angka garis kemiskinan Rp 285,876. Sedangkan pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Aceh Besar mencapai 15,41 persen, dengan angka garis kemiskinan Rp398.752. Berikut tabel garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008-2017

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Persentase Penduduk (%)
2008	285,876	21,25
2009	308,440	20,09
2010	324,096	18,80
2011	351,800	18,36
2012	352,112	17,50
2013	352,451	16,88
2014	352,751	16,13
2015	366,676	15,93
2016	384,545	15,55
2017	398,752	15,41

Sumber: Kabupaten Aceh Besar dalam Angka 2017

Walaupun kemiskinan menurun berdasarkan angka-angka statistik. Namun, kemiskinan secara riil atau kemiskinan *non*-statistik tidak mengalami penurunan dan bahkan meningkat. Hal seperti itu terjadi karena disebabkan dalam mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar

makanan yaitu 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Bila penduduk sudah makan sebanyak 2.100 kilo kalori per kapita per hari maka penduduk itu tidak dikatakan miskin. Beda halnya jika kemiskinan diukur dari sisi pengeluaran berdasarkan kebutuhan dasar manusia, yang kita dapatkan adalah semakin meningkatnya tingkat kesenjangan pendapatan per kapita per hari.

Untuk itu, maka tidak heran jika pemerintah memiliki sejumlah program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program beras miskin (Raskin), program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ke semua program dari pemerintah tersebut memang membuat angka kemiskinan berkurang yang disebabkan karena masyarakat telah mengonsumsi pangan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari melalui bantuan-bantuan yang diberikan. Tercapainya jumlah konsumsi itu juga menghapus status sosial yakni tidak lagi menjadi keluarga miskin atau tidak masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Tetapi fakta di lapangan justru membuat masyarakat semakin terpuruk akibat sulitnya perekonomian. Sebaiknya, penurunan angka kemiskinan juga harus dibarengi dengan menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan yaitu dengan membuka lowongan kerja maupun Balai Latihan Kerja (BLK) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Begitu pula dengan penanggulangan kemiskinan di Aceh Besar. Program yang digulirkan oleh pemerintah pusat kepada dinas sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh Besar

melalui dana APBN berupa Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah Aceh dengan sumber dana APBA, dan Pemkab Aceh menggunakan sumber dana APBK. Dalam rangka mensejahterakan masyarakat, khususnya kaum duafa dan tidak mampu serta untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, Pemkab Aceh Besar mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Program Aceh Besar Sejahtera (Pro-Abes) yang secara khusus bertugas menanggulangi kemiskinan. Tujuan program tersebut untuk mensinergikan penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Aceh Besar dan terintegrasi dengan program nasional PKH. Pelaksanaan Pro-Abes memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah (strategi) sesuai arah dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Aceh Besar dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten itu.

Qardhawi (2005) menyebutkan bahwa Islam memandang kemiskinan sebagai satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggap kemiskinan sebagai musibah dan bencana yang harus cepat ditanggulangi. Seorang muslim harus memohon perlindungan Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan semakin merajalela, maka ia akan menjadi kemiskinan yang mansiyyan (lupa akan Allah dan kemanusiaannya).

Imam Manawy dalam kitabnya Faidhul Qodir menyebutkan, bahwa ada keterkaitan antara kekafiran dan kemiskinan, karena kemiskinan merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin pada umumnya akan menyimpan kedengkian terhadap orang yang mampu, sehingga kemiskinan melenyapkan semua kebaikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah langsung kepada Rasulullah SAW, yang artinya “ *Ya Allah, aku berlindung padaMu dari kemiskinan, kekurangan dan juga dari kehinaan. Aku berlindung padaMu dari perbuatanku untuk menzalimi ataupun terzalimi*” (HR. Abu Daud, Nasa’I dan Ibnu Majah). Hadis ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah SWT dari semua hal yang melemahkan baik secara materi ataupun secara ma’nawi, baik kelemahan itu karena tidak mempunyai uang (kemiskinan) atau tidak mempunyai harga diri dan juga karena hawa nafsu (kehinaan) (Qardhawi, 2005).

Faktor-faktor terjadinya kemiskinan sendiri diantaranya disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, pertambahan jumlah penduduk tiap tahun, pengaruh kebijakan pemerintah, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/Indeks

Pembangunan Manusia. Napitupulu (2017) mengatakan bahwa IPM merupakan salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut, karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakatnya juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi maka seharusnya kemiskinan rendah. Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau indeks pembangunan manusia.

Keberhasilan suatu pembangunan manusia tidak lepas dari adanya campur tangan pemerintah atau kinerja pemerintah dalam menciptakan peraturan atau regulasi. Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang dapat dilihat dari teori pembentukan IPM. Pemerintah memiliki peran dalam pembangunan manusia melalui pengeluaran pemerintah dari sektor publik yaitu pada anggaran di bidang kesehatan untuk dapat meningkatkan angka harapan hidup maupun untuk menurunkan angka kematian. Pada bidang pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga dapat meningkatkan angka melek huruf. Kemudian pada pengeluaran pemerintah seperti belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk bisa meningkatkan pendapatan rill perkapita yang terdapat pada bidang standar hidup layak (Baeti, 2013).

IPM di Aceh Besar dari tahun 2008 sampai tahun 2017 secara garis besar terus mengalami kenaikan. Walaupun pada tahun 2010 sempat mengalami penurunan yang mencapai 69,76 persen dari tahun sebelumnya yaitu 73,01 persen. Berikut tabel IPM di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008-2017

Tahun	IPM (%)
2008	70,84
2009	73,10
2010	69,76
2011	69,94
2012	70,10
2013	68,61
2014	71,06
2015	73,70
2016	73,75
2017	72,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain IPM, TPAK juga mempengaruhi kemiskinan karena jumlah penduduk yang besar akan membuat permasalahan baru yaitu ketenagakerjaan. Banyaknya jumlah penduduk yang berusia produktif di Indonesia tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang ada, sehingga penduduk berusia produktif tersebut menambah jumlah pengangguran dan kemudian berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia.

TPAK adalah perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk dalam usia kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja akan menyebabkan semakin besarnya angkatan kerja, dan

mengakibatkan TPAK juga tinggi (Sukirno, 2007). Angkatan kerja sendiri menurut Sukirno (2007) adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja, golongan yang menganggur, dan yang sedang mencari pekerjaan.

Semakin besar TPAK, semakin besar pula angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja, dan akibatnya semakin kecil pula TPAKnya (Mantra, 2003).

TPAK di Aceh Besar secara garis besar terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai tahun 2017. Namun pada tahun 2012 dan 2013, TPAK di Aceh Besar mengalami penurunan yaitu sebesar 59,70 persen dan 57,87 persen. Berikut tabel TPAK di Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 1.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2008-2017

Tahun	TPAK (%)
2008	55,85
2009	60,38
2010	61,22
2011	64,21
2012	59,70
2013	57,87
2014	61,09
2015	61,90
2016	64,26
2017	59,17

Sumber: Kabupaten Aceh Besar dalam Angka (2017)

Meskipun angka kemiskinan menurun berdasarkan data BPS dan juga berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan, akan tetapi angka kemiskinan di Aceh Besar masih saja tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Aceh Besar Periode 2008-2017”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar?
2. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar.

3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar secara bersama-sama.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selain itu, guna menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pemikiran atau pedoman yang dapat memperluas wawasan bagi pihak yang melakukan penelitian yang sejenis: جامعة الرانيري
3. Bagi instansi terkait, yaitu diharapkan mampu memberikan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak-pihak pengambil kebijakan, sehingga nantinya diharapkan dapat mengambil kebijakan yang tepat.

1.5. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara teratur dan menyeluruh isi dari skripsi ini, maka berikut akan dijelaskan sistematika pembahasan skripsi. Penelitian ini disusun dalam lima bab

pembahasan sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis. Adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai acuan dalam berpikir secara sistematis. Adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang berisi tentang teori-teori yang relevan dengan topik, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

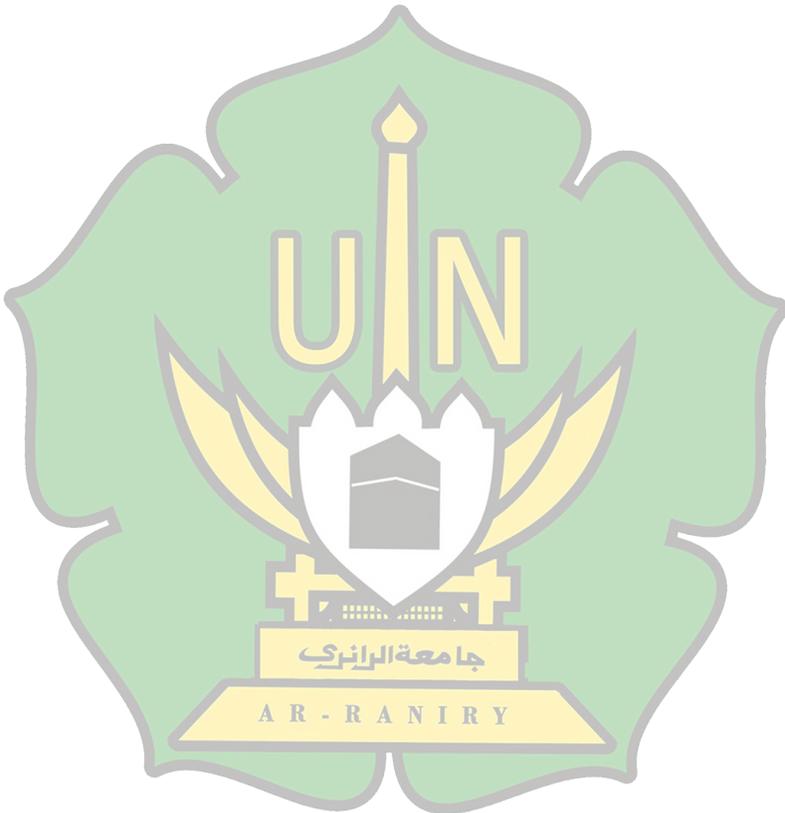
Merupakan bab yang berisi penjelasan tentang jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum kabupaten Aceh Besar, gambaran umum objek penelitian, dan hasil analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan.

BAB V: PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian, dan saran-saran untuk pihak yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kemiskinan

2.1.1. Definisi Kemiskinan

Pengertian kemiskinan sangat luas dan dalam mengukurnya tidak mudah dilakukan. Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana pendapatan penduduk atau rumah tangga tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan dasar, pendapatannya terlalu rendah sehingga tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Kemiskinan relatif memberikan gambaran adanya ketidakmerataan pendapatan antar kelompok penduduk penerima pendapatan, dihitung dengan menggunakan Gini Ratio yang divisualkan dalam kurva Lorenz (Adelfina I. M., 2016:1016).

Kemiskinan adalah *cross sectors problem*, *cross areas* dan *cross generation*, sehingga untuk menanganinya dibutuhkan pendekatan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Untuk mensukseskan program-program percepatan penanggulangan kemiskinan dibutuhkan *political will* (Rejekiingsih, 2011).

Menurut Shirazi dan Pramanik, kemiskinan adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritualitas (Syauqi, 2016:68).

United Nations Development Programs (UNDP) dalam Cahyat (2004:2), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008:27), seseorang dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada di bawah tingkat subsisten. Ukuran subsistensi tersebut dapat diproksi dengan garis kemiskinan. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Menurut Sen (1999) kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak.

Menurut Tambunan (2001:84), besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah ukuran mengenai kesenjangan dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan

berkaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud, kemiskinan relatif dapat berbeda menurut negara atau periode di dalam suatu negara. Sedangkan kemiskinan absolut adalah derajat dari kemiskinan di bawah, di mana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dipenuhi. Ini adalah suatu ukuran tetap (tidak berubah) di dalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum ditambah komponen-komponen non makanan yang juga sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Walaupun kemiskinan absolut sering juga disebut sebagai kemiskinan ekstrem, tetapi maksud dari yang akhir ini bisa bervariasi, tergantung pada interpretasi setempat atau kalkulasi.

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Model ini pada intinya membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan suatu garis kemiskinan (GK), yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan.

Menurut Jeffrey Sachs (2005), terdapat enam modal utama yang tidak dimiliki oleh masyarakat miskin. Pertama, modal manusia yang mencakup kesehatan, nutrisi, keahlian yang

dibutuhkan untuk menjadi produktif dalam ekonomi. Kedua, modal usaha yang meliputi mesin, fasilitas motor elektronik yang dipergunakan dalam bidang pertanian, industri termasuk industri jasa. Ketiga, infrastruktur seperti jalan, listrik, air, sanitasi dan sistem telekomunikasi. Keempat, modal yang berkaitan dengan alam yaitu tanah yang subur, keanekaragaman hayati, ekosistem yang berfungsi dengan baik yang dapat menyediakan pelayanan lingkungan yang dibutuhkan oleh manusia. Kelima, modal institusi publik, seperti peraturan-peraturan perdagangan komersial, sistem hukum, pelayanan dan kebijakan pemerintah yang mengatur pembagian tenaga kerja yang damai dan adil. Keenam, modal pengetahuan yang terdiri atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan produk serta meningkatkan modal fisik dan alam (DP, 2017).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung cukup banyak. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, tingkat upah, jenis pekerjaan, jumlah jam kerja, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), inflasi, jumlah anggota rumah tangga, fasilitas kesehatan, konsumsi rumah tangga, sumber air bersih, transportasi, kepemilikan aset lahan pertanian, pendidikan dan jumlah tahun bersekolah seluruh anggota keluarga, akses permodalan, dan lokasi wilayah tempat tinggal penduduk dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang kalau diamati, sebagian besar dari faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi satu sama lain.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di atas termasuk ke dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara pengentasan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan (DP, 2017).

2.1.2. Teori Kemiskinan

Teori kemiskinan dapat diterangkan melalui empat pendekatan teori berikut ini (Tambunan, 2001:51):

- a. Michael P. Todaro. Salah satu cara atau mekanisme yang utama dalam mengurangi kemiskinan atau dengan mengurangi pengangguran karena cara paling ampuh untuk mengentaskan kemiskinan atau dengan menanggulangi masalah pengangguran dan ketenagakerjaan.
- b. Teori Marx (1787), menurutnya pertumbuhan ekonomi pada tahap pembangunan awal akan meningkatkan permintaan harga tenaga kerja yang berakibat pada peningkatan upah tenaga kerja. Kenaikan kerja akan mempengaruhi terhadap kenaikan rasio capital terhadap penurunan permintaan tenaga kerja yang mengakibatkan masalah pengangguran, ketimpangan pendapatan dan tenaga kerja.

- c. Teori para Ekonom Klasik seperti Roberty (1974), Hayami dan Retten (1985), dan Pralad Char (1983) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan selalu cenderung mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan walaupun masih dalam tahap awal pertumbuhan.
- d. Teori Kuznetz (Firdausi, 1994), teori ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi negara-negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan semakin tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pemerataan distribusi pendapatan, namun bila negara-negara miskin maju dan berkembang maka tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin menurun.

2.1.3. Ciri-Ciri Kemiskinan

Emil Salim (1982) dari kutipan jurnal (Saragih, 2006:59), mengemukakan bahwa ciri-ciri orang miskin adalah:

- a. Umumnya tidak memiliki faktor produksi seperti tanah, modal, dan keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki kecil, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan terbatas.
- b. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha, di samping itu tidak terpenuhinya

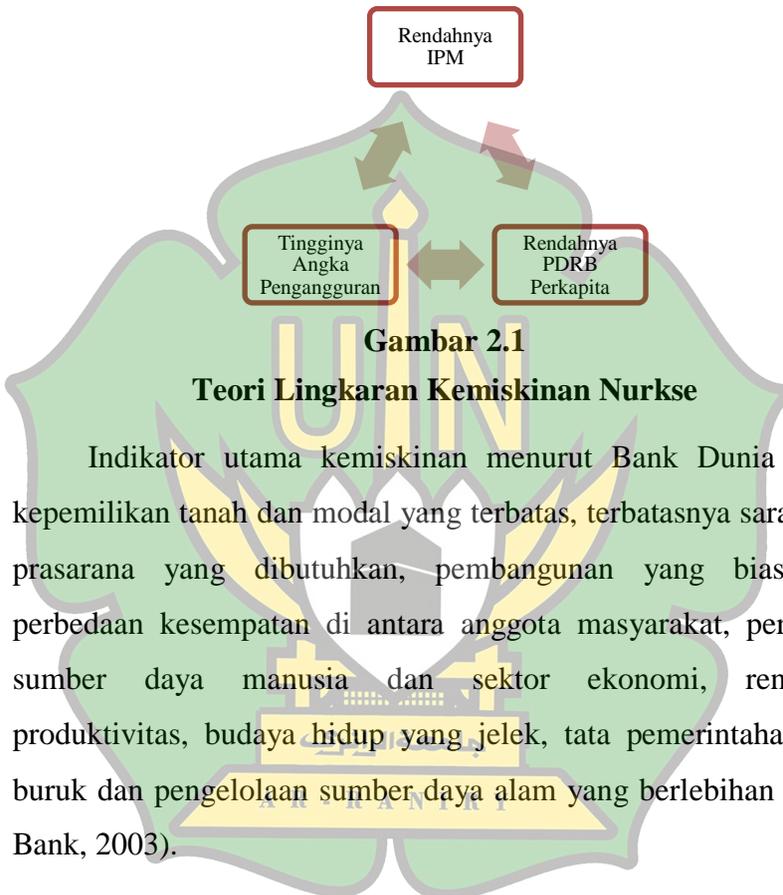
syarat untuk mendapatkan kredit perbankan, menyebabkan mereka berpaling ke rentenir.

- c. Tidak memiliki tanah, jika adapun relatif kecil. Mereka umumnya jadi buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian. Pekerjaan pertanian bersifat musiman menyebabkan kesinambungan kerja kurang terjamin. Mereka umumnya sebagai pekerja bebas, akibatnya dalam situasi penawaran tenaga kerja tingkat upah menjadi rendah dan mendukung atau mempertahankan mereka untuk selalu hidup dalam kemiskinan.

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Mudrajat Kuncoro menerangkan bahwa penyebab kemiskinan berasal dari teori Nurkse yaitu teori lingkaran kemiskinan (Vicious Circle of poverty) di mana terdapat tiga penyebab utama yaitu: (i) adanya keterbelakangan dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (ii) ketidaksempurnaan pasar, dan (iii) kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angka pengangguran). Rendahnya

akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan, begitu seterusnya (Sukmaraga, 2011).



Gambar 2.1

Teori Lingkaran Kemiskinan Nurkse

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan (World Bank, 2003).

Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik ini, yaitu: (i) tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi, (ii) distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata, (iii) mayoritas penduduk di

negara-negara dunia ketiga harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut, (iv) fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, (v) kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga kematian bayi di negara-negara dunia ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju, (vi) serta fasilitas pendidikan dikebanyakan negara-negara berkembang isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai (Michael dan Stephen, 2004).

Arif (2010) menjelaskan dalam bukunya bahwa terdapat tiga macam pendekatan yang menjelaskan mengenai sebab-sebab kemiskinan, yaitu:

a. System approach

Pendekatan yang lebih menekankan pada adanya keterbatasan pada aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi, dan demografi. Kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dianggap lebih banyak menekan warga masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman.

b. Decision-making model

Pendekatan ini menekankan pada kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sebagian warga masyarakat dalam merespon sumber-sumber daya ekonomi, baik yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar. Dengan kata lain, kemiskinan ini disebabkan karena kurangnya inovasi masyarakat untuk melakukan wirausaha, sehingga masyarakat hanya

mengandalkan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh orang lain dan pemerintah tanpa ada upaya untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

c. Structural approach

Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan itu terjadi karena ada ketimpangan dalam kepemilikan atas faktor produksi, seperti tanah, teknologi, produktivitas, dan bentuk modal lainnya. Hal ini tercermin dengan adanya sekelompok kecil dari masyarakat yang justru menguasai modal dan perekonomian masyarakat secara lebih dominan, seperti para pengusaha raksasa, dan sebagainya.

Tiga hal penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2003:107), apabila dipandang dari sisi ekonomi, yaitu:

- a. Kemiskinan muncul karena ketidaksamaan kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia rendah berarti produktivitas rendah, yang pada upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
- c. Kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan akses dan modal.

2.1.5. Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk mem peroleh kebutuhan dasar minimum (Esmara, 1986).

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Pengertian penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, atau pengeluaran kebutuhan makanan minuman yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori (kkal). Tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Konsep kemiskinan menurut Kartasmita (1996), terdapat beberapa ukuran kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural.

a. Kemiskinan Absolut

Seseorang dapat dikatakan miskin absolut apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan

yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Konsep kemiskinan absolut dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum maka orang dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut garis batas kemiskinan.

b. Kemiskinan Relatif

Seseorang dikatakan miskin relatif jika dia sudah berada sedikit di atas batas garis kemiskinan, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya (Wiratmoko, 2008). Kemiskinan relatif diukur dari perbandingan dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Dengan konsep ini meskipun seseorang telah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi jika masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Jika digunakan konsep kemiskinan relatif ini maka batas garis kemiskinan menjadi berfluktuasi tergantung perubahan tingkat hidup masyarakat dan dapat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya akibat tingkat hidup masyarakat yang berbeda.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural menurut Kartasasmita mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan faktor budaya tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidupnya, meskipun ada upaya pihak luar untuk membantunya. Pandangan ini mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang berada di daerah tersebut.

d. Kemiskinan Struktural

Keadaan pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan menjadi tidak merata pula. Ketimpangan ini pada gilirannya menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Perbedaan antara masyarakat yang telah ikut serta dalam proses pembangunan dengan yang masih tertinggal menyebabkan keadaan kemiskinan. Keadaan ini menurut Kartasasmita 1996 dikenal dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini juga dikenal dengan kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum merata.

Sedangkan jika dilihat dari pola waktu, kemiskinan terbagi ke dalam empat pola (Yustika, 2006:26):

- a) *Persistent Poverty*, adalah kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerahnya yang terisolasi.
- b) *Cyclical Poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- c) *Seasonal Poverty*, adalah kemiskinan musiman yang sering dijumpai seperti kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan.
- d) *Accident Poverty*, adalah kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

2.1.6. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang

berpenghasilan di bawah Rp7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori per kapita per hari, sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Konsep ini menghasilkan data penduduk yang bersifat agregat (makro).

World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari.

Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri atas dua elemen (Kuncoro, 2003:103), yaitu :

- a. Pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya.
- b. Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengenalan teoritis tentang garis kemiskinan menjadi suatu titik awal yang penting. Siapakah penduduk miskin, di mana mereka berada dan pada kelompok-kelompok mana saja kemiskinan tersebut terlihat paling

besar dapat dikenali dengan cermat berdasarkan garis kemiskinan. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan tingkat pendapatan minimum yang dimiliki, melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan ini.

2.2. Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Kemiskinan adalah akar kata dari “miskin” dengan awalan ke dan akhiran an yang menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan “kefakiran” yang berasal dari asal kata “fakir” dengan awalan ke dan akhiran an. Dua kata tersebut seringkali juga disebutkan secara bergandengan, yakni kata “fakir miskin” dengan pengertian orang yang sangat kekurangan. Al-Quran memakai beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu *faqir*, *miskin*, *al-sail*, dan *al-mahrum*, tetapi dua kata yang pertama paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kata fakir dijumpai dalam Al-Quran sebanyak 12 kali dan kata miskin disebut sebanyak 25 kali (Aprianto, 2017:177-178).

Dalam bahasa Arab kata miskin diambil dari kata “*saksana*” yang berarti diam atau tenang, sedangkan fakir diambil dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti tulang punggung. *Faqir* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikul sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya (Nafilah, 2016).

Terdapat dua golongan, yaitu fakir dan miskin. Para ahli berbeda pendapat, ada yang mengemukakan bahwa dua golongan tersebut pada hakikatnya adalah sama. Demikian pendapat Abu

Yusuf, pengikut Imam Abu Hanifah, dan Ibnu Qasim pengikut Imam Malik. Berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama, sebenarnya keduanya adalah dua golongan tetapi satu macam, yakni dalam hal kondisi kekurangan dan dalam kebutuhan. Para ahli tafsir dan ahli fikih juga berbeda pendapat dalam memberi definisi kedua kata tersebut. Yusuf Al-Qardhawi memberikan perumpamaan bahwa kedua kata tersebut seperti Islam dan Iman, jika dikumpulkan terpisah, masing-masing mempunyai arti tersendiri, dan jika dipisah terkumpul, yakni bila salah satu disebutkan sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai arti buat kata lain yang sejajar (Qardhawi, 2002:511).

Definisi fakir menurut mazhab Syafi'i dan Hambali yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sekali karena ada sebab khusus yang syar'i (*uzur syar'i*), seperti usia tua, serta sibuk dalam dakwah sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah. Seperti yang tercantum pada QS. Al Baqarah ayat 273:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ

النَّاسِ إِحْسَانًا ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.

Pengertian miskin menurut mazhab Syafi’i dan Hambali adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan (Beik, 2016). Menurut Al-Ghozali kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukan merupakan kemiskinan (Huda, 2015).

2.2.1. Penyebab Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Adapun penyebab kemiskinan yaitu terjadinya perbedaan pendapat. Keberadaan masyarakat yang memiliki penghasilan yang berbeda-beda sesungguhnya tidak dapat dinafikan. Oleh sebab itu, dalam Islam tidak pernah berbicara tentang upaya untuk “menghilangkan” kemiskinan, akan tetapi berbicara tentang

bagaimana kemiskinan tersebut dapat direduksi dan diminimalisir agar kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Caranya adalah dengan saling tolong menolong antar masyarakat, saling membantu antar sesama, saling bersilaturahmi, saling mengisi dan saling bersinergi (Beik dan Arsyianti, 2016).

Menurut Retno (2013), kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural, yaitu:

- a. Kemiskinan timbul akibat kejahatan manusia terhadap alam yang tidak mampu mengelolanya dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Mulq sebagai berikut:

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ
وَنُفُورٍ

Artinya: “Atau siapakah Dia yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezki-Nya? sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?”

Kemiskinan yang timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok yang kaya terhadap kelompok yang lain (miskin) sebagaimana diterangkan dalam QS. Ali ‘Imran sebagai berikut:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
 خَيْرًا لَهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".

2.2.2. Bahaya Kemiskinan

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka kemiskinan ini akan membuat lupa akan adanya Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana bahayanya kemiskinan (kefakiran), bahkan beliau menggambarkan bahwasanya kekafiran mendekati

kekufuran (Aprianto, 2017:179). Sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya:

“Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda: kekafiran mendekati kekufuran.” (HR. Abu Dawud)

Kelompok masyarakat miskin yang berada pada tingkat paling rendah sering dianggap sebagai penyakit masyarakat yang paling buruk. Pada lingkungan masyarakat miskin, semua ideologi yang ekstrim banyak diminati dan semua perbuatan keji sering dihalalkan demi memenuhi keinginannya. Hal ini pernah terjadi pada masa jahiliyah. Saat itu, orang-orang tega membunuh anak-anak mereka karena perasaan takut terhina oleh kemiskinan sebagaimana mereka melihat sebagian pengaruh kemiskinan yang membahayakan kehidupan seseorang (Cahya, 2015). Memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan, sebab:

- a) Kemiskinan membahayakan akidah
- b) Kemiskinan membahayakan akhlak dan moral
- c) Kemiskinan mengancam kestabilan pemikiran
- d) Kemiskinan membahayakan keluarga
- e) Kemiskinan mengancam masyarakat dan kestabilannya

2.2.3. Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Islam

Terdapat 4 (empat) instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam (Lestari, 2017) yaitu:

a) Zakat

Zakat memiliki aturan yang sangat jelas dan adil, dengan mewajibkan membayarkan 2,5 persen dari hartanya setiap tahun zakat mampu mendorong masyarakat untuk memberdayakan hartanya. Dengan demikian akan terjadi peningkatan ekonomi. Selain itu zakat memiliki pengaruh yang cukup signifikan di berbagai sektor ekonomi seperti daya produksi meningkat, mengurangi pengangguran dan mengurangi kesenjangan pendapatan dengan catatan zakat yang disalurkan tidak hanya untuk konsumtif. Zakat juga dibedakan menjadi dua macam yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Dengan pendayagunaan zakat produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, zakat akan mampu mengubah kaum duafa (mustahik) menjadi kaum muzaki di kemudian hari.

b) Infak

Infak atau sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu yang dilakukan dengan mengharap ridho dari Allah SWT. Infak dan sedekah dapat berupa material (uang dan barang) juga dapat berupa non material (keahlian) seperti keahlian yang diberikan menurut profesinya seperti kepada lembaga pendidikan bagi mereka yang berprofesi sebagai guru. Infak atau sedekah yang demikian secara langsung dianggap dapat memberikan

manfaat yang lebih besar sebab dapat mewujudkan kualitas manusia yang lebih baik melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hukum, dan lain.

c) Wakaf

Wakaf merupakan suatu jenis pemberian (barang atau kepemilikan) untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Penanggulangan kemiskinan dengan wakaf dapat berupa pengembangan kelembagaan, akses, kesejahteraan, penyadaran dan partisipasi politik. Pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan harta wakaf yang digunakan untuk pendidikan, ekonomi, dan kegiatan sosial. Secara ekonomi, harta wakaf dapat juga untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin, seperti dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan, rumah sakit, lembaga keuangan mikro, bank wakaf dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar dapat bersaing pada lapangan kerja dan terentaskan dari kemiskinan.

d) Waris

Harta waris merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Konsep waris Islam merupakan mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial riil dalam keluarga. Distribusi kekayaan yang secara adil melalui waris ini menjadi motivasi kepada

pewaris untuk tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan miskin.

2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan merupakan alat yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan negara yang mana pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator dari sebuah pembangunan negara. Pelaksanaan pembangunan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sasaran utama bagi negara sedang berkembang atau negara berkembang untuk dapat menjadikan perekonomian yang lebih baik. Hal ini disebabkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan berkaitan dengan peningkatan jumlah produksi atau jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga saat jumlah barang yang diproduksi meningkat maka kesejahteraan masyarakat akan dapat dinilai meningkat (Mirza, 2012).

Pembangunan sumberdaya manusia digunakan untuk mengembangkan masyarakat agar dapat membangun kemampuannya sendiri. Dasar pembuatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini adalah karena melihat betapa pentingnya memperhatikan kualitas dari sumberdaya manusia (Report, 2002).

Adelfina (2016) membahas tentang konsep pembangunan manusia yang direkomendasikan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) mencakup 4 (empat) komponen yaitu kesetaraan memperoleh akses sumber daya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar negara, produktivitas yang merupakan usaha-usaha yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi, pemberdayaan yang

merupakan upaya untuk membangun kualitas masyarakat dengan cara melakukan perubahan potensi dan kemampuan masyarakat, berkelanjutan yang berarti bahwa dalam mengelola modal pembangunan manusia bisa dimanfaatkan pada periode-periode selanjutnya.

Keberhasilan suatu pembangunan manusia tidak lepas dari adanya campur tangan pemerintah atau kinerja pemerintah dalam menciptakan peraturan atau regulasi. Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah memiliki peran dalam pembangunan manusia yaitu dengan cara melalui pengeluaran pemerintah sektor publik yaitu pada anggaran di bidang kesehatan untuk dapat meningkatkan angka harapan hidup maupun untuk menurunkan angka kematian. Pada bidang pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga dapat meningkatkan angka melek huruf. Kemudian pada pengeluaran pemerintah seperti belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk bisa meningkatkan pendapatan ril perkapita (Baeti, 2013).

Pendekatan pembangunan manusia dikembangkan pertama kali oleh lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk program pembangunan yaitu *United Nation Development Program* (UNDP). IPM merupakan konsep yang mendasari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan. Proses pembangunan sumberdaya manusia adalah

suatu proses yang berjangka panjang yang membutuhkan interaksi dari semua sektor yang akan terjadi dengan bertahap (Bali, 2008).

IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui Human Development Report pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pembangunan manusia adalah sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia yaitu produktivitas (*productivity*); pemerataan (*equity*); keberlanjutan (*sustainability*); dan pemberdayaan (*empowerment*)(Setiawan, dkk, 2013).

IPM merupakan salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkolerasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut, karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi maka seharusnya kemiskinan rendah. Kualitas sumberdaya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(Napitupulu, 2017).

Kebijakan pokok dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara lintas sektoral di antaranya adalah:

1. Peningkatan kualitas fisik manusia (*individual fisycal quality*) yang meliputi jasmani, rohani, dan motivasi serta

kualitas kecukupan kebutuhan dasar seperti terpenuhinya gizi, sandang, perumahan, dan pemukiman yang sehat.

2. Peningkatan kualitas keterampilan (*skills*) sumberdaya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
4. Peningkatan pranata dan penerapan hukum yang meliputi kelembagaan, perangkat, dan aparat serta kepastian hukum. Sedangkan secara sektoral, operasionalnya dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Teori pembentukan IPM dapat diukur dengan 3 (tiga) dimensi di antaranya adalah: berumur panjang dan sehat ditunjukkan oleh harapan hidup ketika lahir yang dirumuskan menjadi *Angka Harapan Hidup*. Kemudian pada dimensi ilmu pengetahuan yang diukur dari tingkat baca tulis dan rata-rata lama sekolah dapat dirumuskan menjadi *Indeks Pendidikan*. Terakhir adalah dimensi *standar hidup layak* yang ditunjukkan oleh pengeluaran riil perkapita (Hasan, 2016).

2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Islam

Menurut pandangan Islam, pembangunan manusia lebih menekankan pada manusia itu sendiri untuk berperan dalam proses

pembangunan. Peran manusia tersebut salah satunya adalah untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dalam pendidikan. Dengan demikian manusia akan mempunyai kualitas hidup yang baik karena keterampilan dan pengetahuannya meningkat sehingga nantinya akan dijauhkan dari kemiskinan.

Dalam buku *Falsafah At-Tarbiyyah Al-Islamiyyah* (Filosofi Pendidikan Islam), Omar M Al Tauny menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan dalam Islam adalah sebagai berikut (Beik dan Arsyianti, 2016):

1. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Dengan demikian, maka *akhlakul karimah* merupakan jiwa dari setiap pendidikan Islam.
2. Untuk mempersiapkan anak didik dalam mempersiapkan kehidupan di dunia dan akhirat secara bersama-sama.
3. Mempersiapkan anak didik dalam memelihara ruh ilmiah (*scientific spirit*) dan untuk mempersiapkan dalam mencari dan menemukan sesuatu (*curiosty*).
4. Mempersiapkan anak didik dalam menguasai keahlian tertentu sesuai dengan keterampilan dan kemampuan.
5. Mempersiapkan anak didik agar memiliki rasa tanggung jawab dalam hidupnya sebagai hamba Allah dan sebagai makhluk sosial.
6. Mengajak anak didik agar dapat memahami hikmah dengan diciptakannya alam semesta dan memanfaatkannya dengan sebaik dan seoptimal mungkin.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa agar manusia menjadi produktif maka dianjurkan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Namun dalam mencari ilmu tersebut tidak hanya dilihat dari duniawi saja akan tetapi juga dilihat dari akhirat. Dengan demikian adanya keseimbangan antara dunia dan akhiratnya.

2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat terutama masyarakat miskin menjadi unsur penting, sehingga tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai. Salah satu indikator pembangunan ekonomi adalah dengan melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada suatu daerah tertentu.

Sukirno (2007) menyatakan bahwa TPAK adalah perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk dalam usia kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja akan menyebabkan semakin besarnya angkatan kerja, dan mengakibatkan TPAK juga tinggi.

Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan (Sukirno, 2004:18). Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berusia 15-64 tahun yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Semakin besar TPAK, semakin besar pula angkatan kerja dalam kelompok yang sama. Sebaliknya semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja, dan akibatnya semakin kecil pula TPAKnya (Mantra, 2003).

Selain itu, dapat disimpulkan bahwa TPAK adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besaran *output* suatu kegiatan perekonomian, sehingga semakin banyak masyarakat yang produktif maka akan menghasilkan *output* yang tinggi pula yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB). Begitupun pada pendapatan perkapita. Meningkatnya TPAK suatu daerah, berarti meningkat pula pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar TPAK menurut (Simanjuntak, 2001) adalah sebagai berikut:

1. Penduduk yang masih sekolah dan mengurus rumah tangga. Semakin besar penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka semakin kecil jumlah angkatan kerja, sehingga semakin kecil pula TPAKnya.

2. Jenis kelamin. TPAK antara laki-laki dan perempuan berbeda, biasanya TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki, hal ini erat kaitannya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa laki-laki memikul kewajiban utama untuk mencari nafkah.
3. Tingkat umur. Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk keluarga, karena mereka pada umumnya bersekolah.
4. Tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin banyak anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, maka semakin banyak jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin tinggi juga TPAKnya.
5. Tingkat pendidikan. Semakin banyak penduduk yang bersekolah maka jumlah angkatan kerja semakin kecil sehingga TPAKnya rendah. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak peluang yang disediakan untuk bekerja dan nilai waktunya semakin mahal.

Secara umum tingginya partisipasi angkatan kerja salah satunya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, sehingga masyarakat lebih memilih bekerja dari pada bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Keluarga yang memiliki keterbatasan pendapatan menyebabkan makin banyak anggota keluarga yang bekerja dari pada bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tjipto (1996)

menyatakan bahwa keputusan keluarga yang mengharuskan seorang istri atau anak untuk bekerja akan meningkatkan jumlah angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Sebaliknya keputusan keluarga yang tidak mengharuskan seorang istri dan anak untuk turut bekerja akan menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan yang dimiliki oleh penduduk usia kerja akan mengakibatkan penduduk lebih memilih bekerja dari pada bersekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga jumlah angkatan kerjanya semakin banyak. Banyaknya penduduk yang termasuk angkatan kerja akan mengakibatkan tingkat partisipasi angkatan kerjanya juga meningkat.

2.4.1. Angkatan Kerja dalam Islam

Menurut Imam Syaibani kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, di mana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah SWT untuk menutupi kebutuhan manusia.

Idwal (2008) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua

kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan. Banyak negara di Asia timur, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Selatan yang kaya akan sumber alam tetapi karena mereka belum mampu menggalinya maka mereka tetap miskin dan terbelakang. Pernah ada yang mengatakan tentang India-Pakistan “Ia merupakan negara kaya yang didiami oleh rakyat yang miskin, oleh karena itu disamping adanya sumber alam juga harus ada rakyat yang mau bekerja sungguh-sungguh, tekun dan bijaksana agar mampu menggali sumber alam untuk kepentingannya. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 97 yang artinya:

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Terdapat empat prinsip ketenagakerjaan dalam Islam (Rahman, 1995), antara lain:

1. Kemerdekaan manusia

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan sosial Rasulullah SAW yang dengan

tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apa pun. Terlebih lagi adanya praktik jual-beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

2. Prinsip kemuliaan derajat manusia

Islam menempatkan setiap manusia, apa pun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya:

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung.”

3. Prinsip keadilan

Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktivitasnya. Adil di sini dimaksudkan juga dalam penyelenggaraan sarana-sarana penghidupan. Keadilan yang harus ditegakkan ialah terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang baik,

bukan dengan merongrong kepada yang kuat, yang miskin pun jangan merongrong yang kaya. Di samping itu keadilan dalam bidang ketenagakerjaan juga pada cara-cara memperoleh produksi, pendistribusian serta dalam pemanfaatannya.

4. Prinsip kejelasan akad (perjanjian) dan transaksi upah

Islam sangat memperhatikan masalah akad, ia termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya. Akad merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan pekerja-majikan yang meliputi: etika, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Selanjutnya perjanjian juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan. Mengingat hal itu maka dalam transaksi amat diperlukan keterbukaan sehingga sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi dan lain-lain dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dihindari dan hal itu diharamkan oleh Islam karena praktik penipuan pasti akan merugikan pihak tertentu.

2.5. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan beberapa penelitian sebelumnya dengan perbedaan dan persamaannya dengan penelitian ini, antara lain

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Penulis dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Wulan Indri Widiana (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat.	Metode <i>Panel Least Square</i> (PLS) dengan PDRB.	Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara IPM dan TPAK	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Variabel dependen (Y). 	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti pengaruh IPM dan TPAK.
2.	Riana Puji Lestari (2017). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi	Analisis data panel dengan pendekatan model efek tetap (<i>fixed effect model</i>).	IPM, Pengangguran dan PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Variabel independen (X). 	Meneliti IPM terhadap Kemiskinan .

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Penulis dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
3.	Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015. Sussy Susanti (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat.	Analisis Data Panel.	PDRB, pengangguran dan IPM berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Variabel Independen(X). 	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti IPM terhadap kemiskinan
4.	Jumikan (2012). Analisis Pengaruh PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (Analisis Data Panel terhadap 35 Kabupaten/	Analisis data panel dengan pendekatan model efek tetap (<i>fixed effect model</i>).	PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sedangkan IPM berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Variabel independen (X). 	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti IPM terhadap kemiskinan.

Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Penulis dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Kota Tahun 2005-2009).		n		
5.	Anwar Rasyadi (2011). Pengaruh Produk	Metode regresi berganda dengan analisis	PDB berpengaruh signifikan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat penelitian • Variabel independen (X). 	<ul style="list-style-type: none"> • Meneliti TPAK terhadap kemiskinan.

2.6. Pengaruh Variabel Independen dan Dependen

2.6.1. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Yasmin (2018) mengatakan bahwa kemampuan untuk keluar dari kemiskinan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan meningkatkan keterampilan, penguasaan teknologi dan produktivitas penduduk. Meningkatnya keterampilan, penguasaan teknologi dan produktivitas akan meningkatkan nilai jual dan kemampuan penduduk untuk memperoleh pekerjaan di dunia usaha atau membuka usaha sendiri, sehingga pengangguran akan berkurang dan tingkat pendapatan akan bertambah. Berkurangnya pengangguran dan bertambahnya tingkat pendapatan akan menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan yang tinggi akan tercermin pada IPM yang tinggi. Oleh karena itu peningkatan kualitas manusia harus terus dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam suatu lingkaran kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, yaitu:

1. Rendahnya tingkat kesehatan;
2. Rendahnya pendapatan; dan
3. Rendahnya tingkat pendidikan.

Sehingga dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah perlu berupaya untuk meminimalisir ketiga penyebab kemiskinan tersebut melalui peningkatan pembangunan manusia yang dapat diproksi dengan IPM.

2.6.2. Pengaruh TPAK terhadap Kemiskinan

Angkatan kerja dapat dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya modal asing, pasar global, dan pelaku birokrasi serta “tekanan” kenaikan upah. Selain itu, masalah kemiskinan sendiri juga sangat berpengaruh terhadap masalah ketenagakerjaan. Rucker (1985) sebagaimana dilansir oleh majalah Nakertrans, menduga bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia bersifat multidimensi sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula. Tidak ada jalan pintas dan sederhana untuk mengatasinya. Strategi pemulihan dan rekonstruksi ekonomi yang bertumpu pada penciptaan lapangan kerja merupakan suatu keharusan. Dalam kaitan ini, masih sangat relevan untuk diperhatikan secara serius dua elemen strategi yang

pernah diajukan oleh Misi ILO (1999) yaitu: i) Strategi dan kebijakan yang membuat proses pertumbuhan ekonomi menjadi lebih memperhatikan aspek ketenagakerjaan, dan ii) Tindakan yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja tambahan melalui program-program penciptaan lapangan kerja secara langsung. Semua itu dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

2.7. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian. Kerangka pemikiran ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil yang relevan atau terkait (Purnomo, 2008). Uma Sekaran dalam Sugiono (2011) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Pengentasan penduduk miskin saat ini masih merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang senantiasa menyita perhatian, karena masalah kemiskinan menyangkut berbagai aspek. Walaupun sudah banyak program kemiskinan yang ditujukan

dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah kemiskinan tidak kunjung selesai. Sulitnya penyelesaian masalah ini disebabkan karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin sangat kompleks (Prima, 2011).

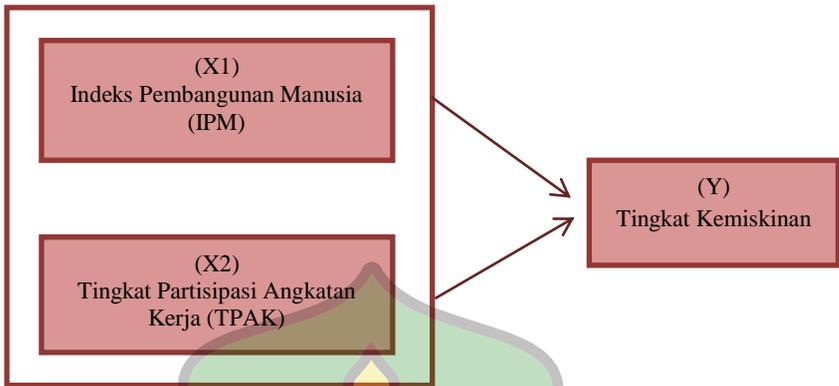
Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*Vicious Circle of poverty*) dari Nurkse 1953. Adanya keterbelakangan dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDRB perkapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya (Kuncoro, 1997).

Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Karena apabila meningkatnya TPAK suatu daerah berarti meningkat pula pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi. Begitupun pada masyarakatnya, semakin banyak masyarakat yang produktif maka akan menghasilkan *output* yang tinggi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta dapat mempengaruhi berkurangnya tingkat kemiskinan.

Berbagai upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin sampai sekarang ini terus dilakukan pemerintah, di antaranya melalui peningkatan IPM dan TPAK. Peningkatan yang dilakukan melalui IPM adalah dengan meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian di bidang kesehatan, pada bidang pendidikan dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah sehingga dapat meningkatkan angka melek huruf, serta pada bidang standar hidup layak yang dapat dilihat dari pengeluaran pemerintah seperti belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur agar bisa meningkatkan pendapatan riil perkapita.

Sedangkan peningkatan yang dilakukan melalui TPAK adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar masyarakat menjadi produktif dan memperluas lapangan pekerjaan sehingga dapat menampung setiap angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Dengan demikian, pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi akan meningkat serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan suatu daerah.

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka pengaruh IPM dan TPAK terhadap Kemiskinan dapat digambarkan dalam suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.8. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Patricia mengatakan hipotesis adalah jawaban sementara yang menyatakan adanya hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti (Farrugia, 2015).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1 = Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Aceh Besar.

H_2 = Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Kemiskinan di Aceh Besar.

H_3 = Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Kemiskinan di Aceh Besar.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan secara rinci dan sistematis mengenai jenis penelitian, metode penelitian, lokasi dan sumber data, tahapan penelitian, proses pemerolehan dan pengolahan data serta analisis data penelitian yang berkaitan dengan pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap kemiskinan di Aceh Besar.

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (*Quantitative methode*). Penelitian kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel bebas dan terikat dengan angka-angka yang diolah melalui analisis statistik. Penelitian kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, sehingga data yang terdiri atas angka-angka dapat ditentukan berlandaskan data statistik (Sugiyono, 2012).

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Syaodih (2009) mengatakan bahwa penelitian kepustakaan yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).

Tujuan dan arah penelitian yaitu deskriptif, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2012).

3.2.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Besar yang beralamat di Jl. Cut Meutia No.1, Jalin, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23911. Penetapan daerah penelitian ini didasarkan pada pertimbangan untuk memudahkan penulis mengumpulkan data yang diperlukan.

3.3.Data dan Teknik Pemerolehannya

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2011), data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. Data sekunder yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun eksternal. Sumber internal misalnya: faktur penjualan, *decision supportsystem*, intelegensi pemasaran, kartu garansi, dan sebagainya. Sedangkan sumber eksternal dapat berupa internet, publikasi, BPS, direktori, jurnal, data panel dan lain-lain.

Data sekunder yang digunakan adalah *time series* berupa data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), serta data Kemiskinan di Aceh Besar dari

tahun 2008 sampai tahun 2017 yang diambil dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Besar.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan studi literatur untuk mendapatkan teori-teori dan bahan untuk acuan penelitian yang sesuai dengan judul penelitian baik dari buku teks, skripsi terdahulu, jurnal penelitian, internet dan lainnya. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data sekunder yang telah ada dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Aceh Besar.

3.5. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menurut (Sugiyono, 2012), variabel bebas (*independen*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*dependen*). Sedangkan variabel terikat (*dependen*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi karena adanya variabel bebas (*independen*).

Adapun spesifikasi variabel adalah:

1. Variabel Bebas (*Independen*)

X1 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X2 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

2. Variabel Terikat (*dependen*)

Y = Kemiskinan

3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Konsep Teori
Independen		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut, karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi maka seharusnya kemiskinan rendah (Napitupulu, 2017).
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (X_2)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk dalam usia kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja akan menyebabkan semakin besarnya angkatan kerja, dan mengakibatkan TPAK juga tinggi (Sukirno, 2007).
Dependen		

Tabel 3.1 – Lanjutan

No	Variabel	Konsep Teori
3.	Kemiskinan (Y)	Kemiskinan menurut Shirazi (1994) dan Pramanik (1998) adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual (Irfan Syauqi, dkk, 2016:68).

3.7. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data menggunakan bantuan microsoft excel dan aplikasi eviews. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan analisis runtun waktu (*time series*).

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi berganda yang di gunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Jika model regresi telah memenuhi beberapa asumsi klasik, maka akan diperoleh perkiraan yang tidak biasa serta efisien (Ghozali, 2011). Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa bagian yaitu:

3.7.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas (Umar, 2009:181).

3.7.1.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi (Umar, 2009:177).

Kriteria dari penilaian ini adalah jika R^2 regresi persamaan utama $>$ dari R^2 regresi *auxiliary* maka di dalam model tidak terdapat multikolinieritas.

3.7.1.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antardata yang ada pada variabel-variabel penelitian (Umar, 2009:182).

3.7.1.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sementara itu untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Umar, 2009:179).

3.7.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2012). Model analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel tidak bebas.

Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kemiskinan

X₁ = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

X₂ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

a = Konstanta

- b = Koefisien Regresi
e = Error Term

3.8.Pengujian Hipotesis

H_{01} : IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2008-2017

H_{a1} : IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2008-2017

H_{02} : TPAK tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2008-2017

H_{a2} : TPAK berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2008-2017

H_{03} : IPM dan TPAK secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2008-2017

H_{a3} :IPM dan TPAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar tahun 2008-2017

3.8.1. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Lestari (2017) Uji F merupakan suatu pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, kriterianya yaitu:

- a) Jika F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

- b) Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.8.2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t menurut Lestari (2017) dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas/dependen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi adalah sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Keputusan penerimaan hipotesis atau penolakannya adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Aceh Besar

Sebelum dikeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1956, Kabupaten daerah Tingkat II Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kewedanaan yaitu:

- Kewedanaan Selimum
- Kewedanaan Lhoknga
- Kewedanaan Sabang

Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh Besar disahkan menjadi daerah otonomi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 dengan ibukotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasaan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibukota tersebut dari Wilayah Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, di mana lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Banda Aceh usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibukota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimum tepatnya Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah kotamadya Banda Aceh. Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukinan Jantho di Kecamatan Seulimum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh team departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah kemukinan Janthoi dengan nama "Kota Jantho".

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibukota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke ibukota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soeparjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

4.1.2. Letak Geografis Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis $5,05^{\circ}$ - $5,75^{\circ}$ Lintang Utara dan $94,99^{\circ}$ - $95,93^{\circ}$ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah $2.903,50 \text{ km}^2$, sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir.

Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim dan 604 Gampong/Desa. Jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat Kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh, yaitu berjarak 106 km dengan pusat ibukota Kabupaten (ibukota terletak di Kecamatan Kota Jantho).

Kabupaten Aceh Besar juga memiliki Kawasan Hutan baik berupa Kawasan Lindung maupun Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung memiliki luas 171.367,22 hektar, di mana Hutan Lindung merupakan areal terluas yaitu mencapai 41,08 persen dari luas Kawasan Lindung yang ada atau seluas 70.402,49 hektar. Kemudian disusul dengan Hutan Produksi seluas 68.549,43 hektar. Sedangkan Kawasan Budidaya yang merupakan Hutan Produksi tetap memiliki luas 41,28 hektar.

4.1.3. Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil estimasi tahun 2016 adalah 400.913 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 205.412 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 195.501 jiwa dengan sex ratio 105,07.

Jika dilihat dari jumlah penduduk di tingkat kecamatan, kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah yang berjumlah 53.1777 jiwa, sedangkan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Leupung yaitu sebanyak 2,919 jiwa.

Walaupun penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Krueng Barona Jaya ternyata menjadi Kecamatan terpadat kedua dengan rata-rata 2.184 jiwa/km². Sedangkan yang terjarang terdapat di Kecamatan Kota Jantho yaitu hanya 16 jiw/km².

Perkiraan penduduk pada pertengahan tahun menurut kelompok umur di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 yang paling banyak berada pada selang umur 0-4 tahun yaitu berjumlah 47.155 jiwa, di mana jumlah laki-laki sebanyak 24.229 jiwa dan perempuan 22.926 jiwa.

Sedangkan kelompok umur yang jumlah penduduknya paling sedikit berada pada rentang usia 65+ tahun, yang hanya berjumlah 4.300 jiwa, di mana jumlah perempuan yaitu 1.853 jiwa laki-laki dan 2,447 jiwa perempuan.

4.1.4. Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Besar

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 adalah sebanyak 555 orang, di mana jumlah pencari kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Jika dilihat dari jumlah pencari kerja yang terdaftar menurut jenjang pendidikan, yang mendominasi adalah tingkat pendidikan S1/D4 dengan jumlah 197 orang. Kemudian tingkat pendidikan SMU/Sederajat sebanyak 196 orang.

4.2. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.2.1. Gambaran Umum Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal (Supriatna, 1997:90).

Dalam perspektif syariah, terjadinya perbedaan pendapatan yang menjadi penyebab kemiskinan sesungguhnya merupakan *sunnatullah fil hayah*. Seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut “Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan

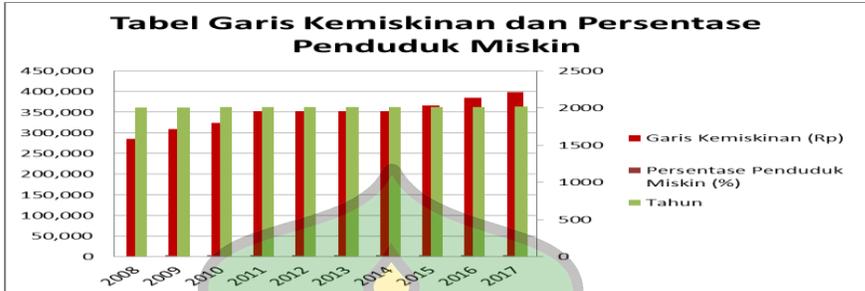
sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”. (QS.Al-Baqarah: 155). Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan sesungguhnya tidak bisa diabaikan. Karena itu, Islam tidak pernah berbicara mengenai bagaimana upaya untuk “menghilangkan” kemiskinan, akan tetapi berbicara bagaimana mereduksi dan meminimalisir kemiskinan ini agar kehidupan yang lebih sejahtera bisa diraih. Caranya adalah dengan mengembangkan sikap saling menolong, saling membantu, saling bersilaturahmi, saling mengisi, dan saling bersinergi (Beik, 2015).

Tabel 4.1
Persentase Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008-2017

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin (%)
2008	285,876	21,25
2009	308,440	20,09
2010	324,096	18,80
2011	351,800	18,36
2012	352,112	17,50
2013	352,451	16,88
2014	352,751	16,13
2015	366,676	15,93
2016	384,545	15,55
2017	398,752	15,41

Sumber: BPS Aceh Besar, 2018

Gambar 4.1
Perkembangan Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008-2017



Sumber: BPS Aceh Besar 2018 (data diolah)

Gambar di atas menunjukkan perkembangan kondisi kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar yang terus mengalami penurunan selama periode tahun 2008-2017. Yang artinya, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya di Kabupaten Aceh Besar. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa selama periode tahun 2008-2017 kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar terus mengalami penurunan yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin yang terus berkurang.

4.2.2. Gambaran Umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Besar

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu indeks harapan hidup; indeks pendidikan; dan indeks standar hidup layak (Bhakti Setiawan, 2013:20).

Tabel 4.2
Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten
Aceh Besar tahun 2008-2017

Tahun	IPM (%)
2008	70.84
2009	73.10
2010	69.76
2011	69.94
2012	70.10
2013	68.61
2014	71.06
2015	73.70
2016	73.75
2017	72.00

Sumber: BPS Aceh Besar, 2018

Gambar 4.2
Perkembangan Kondisi Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008-2017



Gambar di atas menunjukkan perkembangan kondisi IPM di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2008-2017. IPM di Kabupaten Aceh Besar selama periode tahun 2008-2017 mengalami

peningkatan yang cukup baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan IPM di Kabupaten Aceh Besar pada periode tahun 2008-2017 terus mengalami peningkatan.

4.2.3. Gambaran Umum Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Aceh Besar

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja, yang dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berusia 15-64 tahun keatas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Tabel 4.3
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008-2017

Tahun	TPAK (%)
2008	55.85
2009	60.38
2010	61.22
2011	64.21
2012	59.70
2013	57.87
2014	61.09
2015	61.90
2016	64.26
2017	59.17

Sumber: BPS Aceh Besar, 2018

Gambar 4.3
Perkembangan Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008-2017



Sumber: BPS Aceh Besar 2018 (data diolah)

Gambar di atas menunjukkan perkembangan kondisi TPAK di Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2008-2017. Selama periode tahun 2008-2011, TPAK di Kabupaten Aceh Besar terus mengalami peningkatan yang cukup baik. Namun pada tahun 2012-2013, TPAK di Kabupaten Aceh Besar terus mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2014-2016, TPAK kembali mengalami peningkatan yang cukup pesat dan melampaui tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2017 TPAK kembali mengalami penurunan yang mencapai 59.17. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa TPAK di Kabupaten Aceh Besar selama periode tahun 2008-2017 terus mengalami peningkatan.

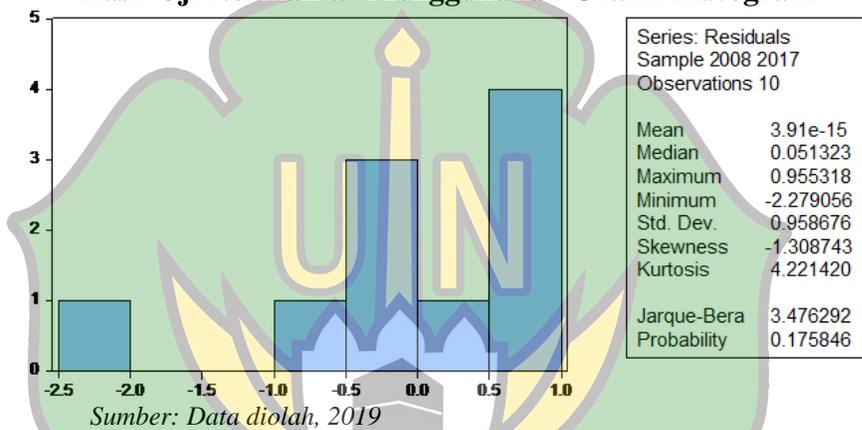
4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien.

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang memiliki distribusi normal merupakan data yang layak dan baik untuk digunakan dalam penelitian.

Gambar 4.4
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram



Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila probabilitas JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal atau sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai Prob JB hitung sebesar $0,175846 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi.

4.3.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah untuk membuktikan apakah ada hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi yang digunakan. Konsekuensi dengan adanya uji ini adalah koefisien regresi variabel tidak tentu dan kesalahan menjadi tak terhingga. Berikut adalah hasil uji statistik menggunakan Eviews 9.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic
	VIF
IPM	1.153014
TPAK	1.153014

Sesuai dengan ketentuan uji multikolinieritas, jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan tabel uji statistik dapat dilihat bahwa nilai VIF masing-masing variabel yaitu untuk variabel IPM (X_1) nilai VIF sebesar $1,153 < 10$ sedangkan untuk variabel TPAK (X_2) nilai VIF sebesar $1,153 < 10$. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian ini, yang berarti antara variabel IPM dan TPAK tidak saling mengganggu atau mempengaruhi.

4.3.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan waktu atau ruang sebelumnya.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	0.953595
Prob. F(2,5)	0.4458

Sumber: data diolah, 2019

Dari tabel diatas menunjukkan nilai Prob. F(2,5) sebesar 0,4458 yang artinya nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.3.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel sama untuk semua pengamatan/observasi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homoskedastisitas dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi heteroskedastisitas.

Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linear adalah dengan melihat nilai prob F. Statistic. Apabila nilai prob F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai prob F

hitung lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka terjadi heteroskedastisitas.

Untuk melihat ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas dalam model regresi maka dilakukan menggunakan analisis statistik metode *Breusch-Pagan-Godfrey*.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Metode
Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.145167
Prob. F(2,7)	0.8674

Sumber: data diolah, 2019

Pada tabel diatas menunjukkan nilai Prob. F hitung sebesar 0,8674 > 0,05 yang menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun model regresi yang dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Kemiskinan
- X₁ = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- X₂ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- e = Error Term

Berikut ini merupakan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan Eviews 9.

Tabel 4.7
Hasil Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic
C	103.3908	14.86008	6.957620
IPM	-0.743867	0.218045	-3.411530
TPAK	-0.525824	0.148662	-3.537043

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel di atas diperoleh koefisien untuk variabel IPM (X_1) adalah -0,743867, variabel TPAK (X_2) adalah -0,525824, dan konstanta sebesar 103,3908 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 103,3908 + (-0,743867)X_1 + (-0,525824)X_2 + e$$

Model persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 103,3908 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel IPM (X_1) dan variabel TPAK (X_2) maka nilai variabel kemiskinan (Y) adalah 103,3908.
- b. Koefisien b_1 sebesar -0,743867, artinya variabel IPM (X_1) mempunyai koefisien regresi yang negatif terhadap kemiskinan (Y). Artinya apabila variabel IPM (X_1) meningkat sebesar 1%, maka kemiskinan (Y) akan menurun sebesar -7,43867% dengan asumsi variabel lain di luar model tetap (*ceteris paribus*).
- c. Koefisien b_2 sebesar -0,525824, artinya variabel TPAK (X_2) mempunyai koefisien regresi yang negatif terhadap

kemiskinan (Y). Artinya apabila variabel IPM (X_1) meningkat sebesar 1%, maka kemiskinan (Y) akan menurun sebesar -5,25824% dengan asumsi variabel lain di luar model tetap (*ceteris paribus*).

4.5. Pengujian Hipotesis

4.5.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara individu antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat.

- a. Jika tingkat signifikansi $t_{hitung} > 0,05$ maka H_a diterima
- b. Jika tingkat signifikansi $t_{hitung} < 0,05$ maka H_a ditolak

Tabel 4.8
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	103.3908	6.957620	0.0002
IPM	-0.743867	-3.411530	0.0113
TPAK	-0.525824	-3.537043	0.0095

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil estimasi pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa:

1. Untuk pengaruh IPM terhadap persentase kemiskinan diperoleh nilai t hitung sebesar -3,411 dengan nilai probability sebesar 0,011. Nilai probability $0,011 < 0,05$, artinya bahwa IPM secara parsial berpengaruh terhadap persentase kemiskinan.
2. Untuk pengaruh TPAK terhadap persentase kemiskinan diperoleh nilai t hitung sebesar -3,537 dengan nilai probability

sebesar 0,009. Nilai probability $0,009 < 0,05$, artinya bahwa TPAK secara parsial berpengaruh terhadap persentase kemiskinan.

4.5.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen, pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Bila hasil perhitungan menunjukkan nilai $\text{Prob} < 0,05$ atau nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ dengan tingkat kepercayaan 0,05 berarti hipotesis diterima.

Tabel 4.9
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Prob(F-statistic)	0.001487
F-statistic	18.99062

Sumber: Data diolah, 2019

Hasil estimasi pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa $(\text{Prob-F}) = 0,001487$ atau $(\text{Prob-F}) < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menandakan semua variabel independen (IPM dan TPAK) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kemiskinan).

4.5.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji R^2 dalam penelitian ini diolah dengan bantuan Eviews 9, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R Square
1	0.844380

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai R^2 sebesar 0,844 interpretasinya adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel IPM dan TPAK terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar periode tahun 2008-2017 adalah sebesar 84,4% sedangkan sisanya 15,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model.

4.6. Pembahasan

Menurut Imam Al Ghozali kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukan merupakan kemiskinan. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk selalu hidup secara berkecukupan. Karena islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT.

Kemiskinan pada sejatinya tidak dapat dihilangkan, karena menjadi *sunnatullah fil hayyah*, walaupun dengan berbagai jenis kebijakan dan program dengan sistem pemerintahan yang berbeda dari tahun ke tahun, masalah kemiskinan tetap ada dan tidak dapat dihilangkan secara total, akan tetapi masih bisa diminimalisir persentase kemiskinan di seluruh wilayah dengan menggunakan

beberapa program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun kebijakan dari pemerintah.

Begitu pula dengan kemiskinan di daerah Kabupaten Aceh Besar sendiri. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, walaupun angka kemiskinan di daerah Kabupaten Aceh Besar menurun berdasarkan angka-angka statistik, namun kemiskinan secara riil atau *non*-statistik tidak mengalami penurunan dan bahkan meningkat. Hal tersebut terjadi karena dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yaitu 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Artinya apabila penduduk sudah makan sebanyak 2.100 kilo kalori per kapita per hari maka penduduk tersebut tidak dikatakan miskin. Sangat beda halnya jika kemiskinan diukur dari sisi pengeluaran berdasarkan kebutuhan dasar manusia, yang kita dapatkan adalah semakin meningkatnya tingkat kesenjangan pendapatan per kapita per hari.....

Dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi di Kabupaten Aceh Besar, maka sudah menjadi tugas utama bagi pemerintah dan pihak terkait dalam membuat program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan prinsip pertumbuhan ekonomi dalam islam yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan tujuan masyarakat akan mampu hidup secara mandiri dan mampu memberikan kehidupan yang layak kepada masyarakat lainnya. Disinilah fungsi dari Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu dengan menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan pelatihan-pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk dapat bersaing. Hal tersebut secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara perkapita yang sekaligus dapat mengurangi angka kemiskinan.

Kemiskinan dapat mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia karena dalam islam kemiskinan dapat mengancam kestabilan pemikiran dan membahayakan keluarga. Masyarakat miskin pada umumnya bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pangannya saja tanpa memikirkan pendidikan dan kehidupan sosial lainnya. Padahal islam menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu seluas-luasnya. Akan tetapi, karena dalam keadaan miskin mereka tidak lagi memikirkan bagaimana caranya melanjutkan pendidikan, sehingga pemikiran mereka sempit. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal tersebut akan menurun kepada generasi selanjutnya yang akan mengakibatkan tidak tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan bangsa.

Kemiskinan juga merupakan suatu hal yang sangat mengancam dan membahayakan masyarakat. Karena masyarakat miskin biasanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan dan dapat merugikan masyarakat lain demi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi dirinya maupun keluarganya.

Disinilah fungsi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat dibutuhkan. Karena IPM yang tinggi diharapkan dapat menjadi jaminan terselenggaranya pendidikan yang baik, masyarakat yang sehat, dan standar kehidupan yang layak yang secara otomatis dapat meningkatkan produktivitas dan kreatifitas masyarakat serta menekan lajunya angka kemiskinan.

4.6.1. Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Hasil uji t untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Besar pada periode tahun 2008 sampai 2017 memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan yang dibuktikan dengan nilai *P value* sebesar 0,0113 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,743867 yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, artinya apabila peningkatan faktor IPM sebesar 1 (satu) maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 743 jiwa. Hasil pada penelitian ini sesuai dengan hasil pada penelitian Jumikan yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah” yaitu IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.6.2. Pengaruh TPAK Terhadap Kemiskinan

Hasil uji t untuk variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Aceh Besar pada periode tahun 2008 sampai 2017 memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan yang dibuktikan dengan nilai *P value* sebesar 0,0095 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,525824 yang

menyatakan bahwa TPAK berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, artinya apabila peningkatan faktor TPAK sebesar 1 (satu) maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 525 jiwa. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hasil pada penelitian Wulan Indri Widiana yang berjudul “Pengaruh IPM dan TPAK terhadap PDRB” yaitu TPAK memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.6.3. Pengaruh IPM dan TPAK Terhadap Kemiskinan

Hasil uji F untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2017 secara bersamaan (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan nilai $(\text{Prob-F}) = 0,001487$ atau $(\text{Prob-F}) < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya semua variabel independen (IPM dan TPAK) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kemiskinan).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh IPM dan TPAK terhadap kemiskinan dalam perspektif ekonomi islam di Aceh Besar, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y).
2. Hasil uji parsial (uji t) diperoleh bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y).
3. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diketahui bahwa variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan (Y).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel lain.

2. Bagi pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat memperluas lapangan kerja baru bagi masyarakat serta memberikan pelatihan-pelatihan kerja agar kemampuan dari masyarakat dapat berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

- Adelfina, I. M. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 – 2013*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 5 No.10.
- Aprianto, N. E. (2017). *Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam*. Jurnal Ekonomi Islam Volume 8 No. 2.
- Arif, N. R. (2010). *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*. Bandung: Alfabeta.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal, Volume 2, No. 3*, 85.
- Bali, B. P. (2008). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2008. *Katalog BPS : 4102002.5103*.
- Beik, I. S. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bhakti Setiawan, d. (2013). *Indeks Pembangunan Manusia*. Jurnal Economika Vol. 9 No. 1.
- Cahyat, A. (2004). Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa Model Perhitungan Di Indonesia. Poverty dan decentralization project CIFOR (center for international forestry research. 2.
- DP, M. K. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Volume 8 No. 01*, 17.

- Esmara, H. (1986). *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Farrugia, P. (2015). *Research questions, hypotheses and objectives*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harlik, dkk.(2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 01 No. 02.
- Hidayat, D. W. (2017). *Perencanaan Pembangunan daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Irfan Syauqi, dkk. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jumikan. (2012). *Analisis Pengaruh PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah (Analisis Data Panel terhadap 35 Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009)*.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat :Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kotambunan, dkk.(2016). *Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (dalam kasus 2005-2014)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 01.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis ?* Jakarta: Erlangga.

- Lestari, R. P. (2017). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015.
- Mantra, I. B. (2003). *Demografi Umum*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Michael P. Todaro, S. C. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal, Volume 1, No. 1*, 102.
- Napitupulu, A. S. (2017). Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara. *Skripsi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara : 2017*.
- Qardhawi, Y. A. (2002). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Rahman. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rasyadi, A. (2011). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap Kemiskinan di Indonesia.
- Rejkiningsih, T. W. (2011). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12 No. 1*, 28.
- Report, A. H. (2002). *Human Development : Definition, Concept and Larger Context*.
- Saragih, T. (2006). *Pengangguran Pendidikan dan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi Teleskop STIE. Y.A.I, Vol 5 Edisi 9.

- Setiawan, dkk.(2013). *Indeks Pembangunan Manusia*. Jurnal *Economika*, Vol 9 No. 1.
- Simanjuntak, J. P. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Burs Pers.
- Sukirno, S. (2004). *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2007). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukmaraga, P. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per Kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah.
- Supriatna.(1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama.
- Syauqi, I. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Tambunan, Tulus. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Tambunan, Tulus. (2006). *Pembangunan Ekonomi Inklusif*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi ke 7*. Jakarta: Erlangga.

- Umar, H. (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Utama, M. S. (2010). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Bali*. Bali: Orasi Ilmiah.
- Yustika, A. E. (2005). *Perekonomian Indonesia, Deskripsi, Preskripsi, dan Kebijakan*. Malang: Bayumedia.

